

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika serikat (AS) merupakan sebuah negara yang menarik untuk diteliti, terutama jika kita mempelajari fenomena hubungan internasional dan perkembangan ilmu hubungan internasional pasca terbentuknya negara bangsa (*nation state*). Titik balik tatanan internasional dan sistem negara modern sampai saat ini merupakan hasil dari perjanjian West Phalia (1648).¹ Arti penting perjanjian perdamaian West Phalia bagi perjalanan hubungan internasional adalah kontrak bagi dunia internasional akan adanya kedaulatan negara yang dahulu batas-batas negara itu sering dipertentangkan kemudian dikonsolidasikan dan dipersatukan kedalam satu nilai, yaitu negara yang berdaulat.

Tanpa terkecuali Amerika Serikat adalah negara yang tumbuh dan berkembang sebagai konsekuensi adanya perjanjian West Phalia, negara ini mempunyai andil dan peranan yang signifikan terhadap sistem internasional sampai sekarang ini, fakta ini dapat dikarenakan AS adalah negara adikuasa yang memiliki power (ekonomi, politik, dan militer) yang kuat. Dan salah satu faktor yang penting adalah kenyataan bahwa Amerika Serikat memberikan ruang yang lapang bagi tumbuh-kembangnya disiplin ilmu politik terutama kajian-kajian mengenai fakta atas pola interaksi negara-negara internasional yang kita kenal sebagai disiplin ilmu hubungan internasional. Perihal ini dapat kita lihat dengan adanya imigran-imigran eropa yang bermigrasi ke

¹ Lynn H. Miller, *Agenda Politik Internasional*, terj. Daryatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 42

Amerika Serikat antara tahun 1920-1940-an.² Salah satunya dan kemudian menjadi tokoh realisme yang terkemuka adalah Hans J. Morgenthau yang hijrah dari Jerman akibat ketidakstabilan politik di Eropa pada saat itu.

Kemudian menjadi fakta yang menarik untuk melakukan sebuah pengkajian ketika penulis melihat sangat erat keterkaitannya antara Amerika Serikat sebagai negara super power dengan pertumbuhan mazhab realisme dan signifikansi tindakan kebijakan politik AS terhadap tatanan internasional (*world order*). Dan bahkan dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat didominasi oleh realisme politik.³

Sebagaimana Shaummil Hadi dalam bukunya, "*Third Debat dan Kritik Positivisme Ilmu Hubungan Internasional*,"

....terdapat dua factor yang dengan segera mempengaruhi kajian-kajian HI setelah perubahan diskursus idealisme ke realisme, Pasca Perang Dunia terjadi.[....] pertama, hal ini menuntut kajian HI yang lebih saintifik sebagai konsekuensi pemahaman ontologism realisme (diskursus realisme saintifik). Kedua, dikarenakan karena pemahaman ontologis, realisme itu, kajian HI dinilai harus lebih pragmatis yang menyangkut pemuasan kebutuhan bagi para pembuat keputusan—diskursus realisme pragmatis. Sebab, pada kenyataannya yang diliputi suasana ketegangan dan desakan politik PD II itu adalah para pembuat keputusan yang pada dasarnya hanya membutuhkan sebuah pandangan tepat yang dapat dimanifestasikan secara langsung. Akhirnya secara umum, perubahan dari idealism ke realisme menuntut perubahan secara signifikan dari bagaimana HI seharusnya dijelaskan dan dipelajari.⁴

Situasi yang dialami negara-negara pada saat itu, pada era 1920-1950an menuntut agar para pembuat keputusan mampu berpikir secara rasional atas kondisi yang ada,

² Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar studi Hubungan Internasional*, terj. Dadan Suryadipura, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 54

³ Diakses: <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/opini>

⁴ Shaummil Hadi, *Third Debat dan kritik positivisme ilmu hubungan internasional*, Yogyakarta dan Bandung, Jalasutra, 2008, hal. 64

serta tuntutan membuat keputusan dengan cepat dan tepat berdasarkan diskursus realisme pragmatis.

Demikian juga dengan Amerika Serikat yang mempunyai signifikansi di dunia internasional terutama pada saat terjadi meletusnya Perang Dunia Kedua dan pasca terjadinya peristiwa perang tersebut. Amerika adalah negara super power yang mempunyai peran penting dalam kemenangan dan memenangkan sekutu demokratisnya (Eropa: Inggris dan Perancis)⁵ dalam Perang Dunia Kedua.

Embrio hubungan internasional yang terlembagakan sangat erat hubungannya dengan peristiwa “Pertemuan Pertama Dunia pengukuhan politik internasional” (*The World's First Chairs in International Politic*) pada tahun 1919 di Universitas of Wales, Aberystwyth.⁶

Dan kemudian hubungan internasional benar-benar terinstitusikan pasca meletusnya Perang Dunia Pertama yang merubah wajah dunia internasional. Para teoritis berangkat dari titik bagaimana memahami perang, terciptanya dan solusi pencegahannya, dan yang merepresentasikan kecemasan individu maupun kelompok-kelompok khususnya masyarakat Eropa akan kembali terjadinya peristiwa-peristiwa perang yang mengerikan. Awal studi HI sebagai subjek akademik terfokus kepada konflik dan perdamaian, bagaimana tatanan internasional yang anarkhi, berdasarkan sejarah mampu berubah dan mencapai kemajuan.

⁵ Robert Jackson & Georg Sorensen, *opcit*, hal. 48

⁶ *Ibid*, hal. 46

Selanjutnya para pemikir tersebut yang kemudian dikenal sebagai penstudi liberalisme, yang berusaha untuk mengembalikan krisis kepercayaan diri bangsa Eropa akan pandangan bahwa modernitas yang ditandai dengan revolusi industri malah menciptakan mesin-mesin perang yang berbalik memusnahkan manusia. Mengutip Francis Fukuyama, "suatu peristiwa kritis yang telah merusak kepercayaan diri Eropa".⁷ Mengangkat kembali semangat akan kebebasan muncul setelah Perang Dunia Kesatu untuk menanggapi ketidakmampuan negara-negara untuk mengontrol dan membatasi perang dalam hubungan internasional mereka. Dengan demikian, terdapat tekanan yang mendesak untuk mempelajari dan mengetahui penyebab-penyebab terjadinya perang dan faktor-faktor pencapaian akan kondisi perdamaian.

Dengan alasan di atas, maka tidak mengherankan kemunculan gelombang liberalisme ini mendominasi pada awal-awal studi hubungan internasional di Amerika dan Inggris sebagai dua negara yang menjadi pilar disiplin ilmu ini.

Terdapat dua asumsi dasar kaum liberal dalam membangun pandangan intelektualnya terhadap dunia internasional,⁸ yakni: pertama, kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Walau kaum liberal mengakui bahwa individu memiliki banyak kepentingan, dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif. Kedua, kaum liberal meyakini kemajuan yang berarti kehidupan yang lebih baik, paling tidak bagi mayoritas

⁷ *Ibid*, hal. 55

⁸ Shaudi Hadi, *Op.cit*, hal. 57

individu. Manusia memiliki akal pikiran yang ketika mereka gunakan pada masalah-masalah internasional, kerjasama yang lebih besar adalah hasil akhir.

Yang berarti liberalisme meyakini bahwa ketika manusia menggunakan akal rasionalnya akan tercipta hubungan berdasarkan kepada kerjasama yang mampu menghindarkan individu bahkan negara dari konflik, kerjasama yang tercipta bukan hanya dalam negara tetapi bahkan lintas batas negara. Maka implikasi logisnya Ide-ide liberal ini hanya dapat terwujud di negara yang bersuhu demokratis. karena Mereka kaum liberal meyakini, bahwa sesama negara demokratis tidak akan saling menyerang dan hukum keberlanjutannya adalah akan membawa wajah hubungan internasional kearah perdamaian.

Akan tetapi, mengenai "kemajuan" ini, terjadi perdebatan pandangan ditubuh liberalisme itu sendiri, kemajuan yang seperti apa? Siapa yang memperoleh kemajuan, sebagian kecil atautkah keseluruhan? Dan apa batas-batas dari kemajuan itu? Robert Keohane mencatat yang dikutip oleh Robert Jackson dan Georg Sorensen, bahwa terjadi optimisme fluktuatif liberalisme atas pertanyaan-pertanyaan mendasar di tubuh paradigma liberalisme itu sendiri, menurut Keohane liberalisme berada dalam keyakinan yang minimum "paling tidak dalam kemungkinan kemajuan kumulatif".⁹

Cara pandang kaum liberal menjadi cara pandang yang dominan bagi sebagian besar para negarawan dunia. Salah satunya yang juga merupakan presiden Amerika Serikat pada saat itu adalah Woodrow Wilson yang juga sebagai seorang professor

⁹ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Op.cit*, hal. 141-142

dibidang ilmu politik.¹⁰ Wilson mempunyai misi untuk menyebarkan nilai-nilai liberal-demokratis ke Eropa dan seluruh negara-negara didunia. Dengan demikian maka menurut mereka (kaum liberal) bencana besar dunia dapat dihindari, dengan jalan mereformasi sistem internasional dan juga mereformasi struktur domestik negara otokrasi ke aras demokratisasi.

Berangkat dari pandangan liberalisme Wilson percaya akan rasionalitas manusia dan masyarakat, ketika digunakan sebagai alasan-alasan dalam membina hubungan internasional, maka mereka dapat membentuk organisasi internasional yang dapat menguntungkan bagi semua pihak.¹¹ Maka kemudian dibentuklah organisasi internasional Liga Bangsa Bangsa (LBB) dan Mahkamah Internasional yang merupakan manifestasi pemikiran demokrasi-liberal Woodrow Wilson untuk menghindari dunia internasional dari ancaman perang.

Selain Woodrow Wilson, ada satu lagi tokoh liberal awal yang terkenal pada era yang sama, adalah Norman Angell yang pada tahun 1909 menerbitkan buku yang berjudul "*The Great Illusion*" yang menceritakan bahwa pemimpin-pemimpin dunia dan warga negaranya memiliki pandangan tentang perang yang akan mendatangkan keuntungan yang besar, namun menurut Angell keuntungan atas perang itu hanya merupakan sebuah ilusi, yang benar adalah: dijamin modern penaklukan wilayah sangatlah mahal dan secara politis sangat merugikan sebab hal itu sangat mengganggu perdagangan internasional.¹²

¹⁰ *Ibid*, hal. 48

¹¹ Shaudi Hadi, *opcit*, hal. 59

¹² Robert Jackson & Georg Sorensen, *opcit*, hal. 50

Angell merupakan pelopor liberal akhir tentang modernisasi dan interdependensi ekonomi. Selanjutnya menurut pemikir liberal ini akan terjadi proses perubahan dan kemajuan yang dapat merubah perang dan penggunaan kekuatan lainnya semakin terkikis dan diabaikan.

Pada perjalannya kemudian studi awal ilmu hubungan internasional yang memuat pemikiran liberalisme utopian mendapatkan pukulan yang telak dari para pemikir realis. Kaum realis menolak dengan keras pandangan dan asumsi-aumsi liberalisme utopian atas fakta politik dunia internasional, adalah E.H. Carr seorang penstudy HI Inggris yang berpendapat bahwa para pemikir HI liberal salah menilai fakta sejarah dan salah menilai sifat hubungan internasional. Mereka salah meyakini bahwa hubungan semacam itu dapat didasarkan pada harmoni kepentingan antara negara-negara dan masyarakat.¹³

Carr berpandangan, titik awal yang benar adalah kebalikannya: kita harus menganggap bahwa ada konflik kepentingan yang dalam baik antarnegara maupun antarmasyarakat. Yang berarti bahwa hubungan internasional selalu dilandasi dengan konflik kepentingan, negara dan masyarakat masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga yang tidak punya berusaha memiliki sesuatu agar negaranya dapat eksis dalam tatanan politik dunia. Kemudian Carr dengan cerdas menamakan posisi liberalisme dengan sebutan "utopian" sebagai lawan dari posisinya sendiri.

¹³ E. H. Carr, *The Twenty Year's Crisis*, 1964, dikutip oleh, Shaummil Hadi, *Loc.cit*

Hantaman E.H. Carr terhadap paradigma liberal dikukuhkan oleh penstudi realisme yang hijrah dari Jerman ke Amerika, Hans J. Morgenthau dengan "*Politics Among Nations: The Struggle For Power And Peace*".¹⁴

Kedua tokoh tersebut dapat dianggap mempopulerkan realisme sebagai pendekatan dan arahan hubungan internasional, dan realisme sebagai suatu alternatif paradigma baru (dalam istilah Thomas S. Kuhn).¹⁵

Ketika terjadi anomali dalam sebuah paradigma, dimana liberalisme tidak dapat menjelaskan fenomena hubungan internasional dengan meletusnya Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1930an, maka terjadilah peralihan dari paradigma tersebut ke paradigma realisme yang lebih dapat menjelaskan esensi dari politik hubungan internasional. Yang lebih mampu merefleksikan sebagai kenyataan atas pola-pola interaksi antarnegara. Selanjutnya pada masa itu, terutama tahun 1950an dalam perkembangannya perspektif kaum realis sangat mendominasi sebagian analisis politik internasional dan menjadi paradigma dominan dikalangan penstudi HI.¹⁶ Khususnya di Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan pilar institusi akademis bagi disiplin ilmu ini.

Refleksi kenyataan realisme terhadap fenomena hubungan internasional, ditunjukkan oleh E. H dengan menjelaskan sebab-sebab terjadinya Perang Dunia Kedua, Carr dalam magnum opusnya menjelaskan,

¹⁴ Shaudi Hadi, opcit. hal. 61

¹⁵ Baca: Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*

¹⁶ Lynn H. Miller, *Agenda Politik Internasional*, terj. Daryatno, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hal. 159

“Yang punya” (*The Have*) dan “Yang Tidak Punya” (*The Have Not*). Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat merupakan pihak yang punya, dalam istilah Carr, kekuatan besar yang ingin berpegang pada apa yang mereka miliki, yaitu status quo, dan Jerman, Italy, dan Jepang adalah pihak “yang tidak punya”. Jadi sudah sewajarnya, menurut kaum realis, jika “yang tidak punya” akan mencoba dan memperbaiki keseimbangan internasional melalui penggunaan kekuatan.¹⁷

Jadi dalam pandangan para tokoh realisme merupakan bukan peristiwa yang luar biasa terjadinya Perang Dunia Kedua. Karena ada negara-negara “yang tidak punya” dalam istilah Carr yang mencoba untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap pihak “yang punya”.

Dalam pandangan kaum realis, kesalahan terburuk idealis-liberalisme “utopian” bahwa mereka salah dalam melihat esensi akan konteks dari hubungan internasional terhadap apa yang ada. Yaitu bahwa, pada dasarnya sifat politik dan hubungan internasional adalah “kekuasaan”. Seperti teori yang dicetuskan oleh tokoh realis neoklasik yang berpengaruh Hans J. Morgenthau yang menyatakan “bahwa sifat manusia merupakan dasar hubungan internasional tidak lebih dari hubungan manusia lain manapun. Dan manusia mementingkan diri sendiri serta mengejar kekuasaan, dan itu dapat dengan mudah menyebabkan agresi”.

Realisme pada hakikatnya bukan merupakan konstruksi teori yang mapan, realisme hanya berusaha untuk menyediakan petunjuk pertimbangan politis atas tindakan politik luar negeri suatu negara khususnya Amerika Serikat yang bersifat pragmatis. Yang berarti realisme hanya menyediakan beberapa pilihan atas kenyataan yang ada untuk para negarawan, untuk memilih dari alternatif-alternatif

¹⁷ Shaummil Hadi, *loc. cit*

tindakan yang paling rasional dalam kondisi yang mendesak. Robert L. Rothstein menjelaskan sebagai berikut:

Realisme menjadi penting bukan karena adanya hubungan langsung antara teori dan aksi. Melainkan pada kekuatan dan pengaruhnya yang diletakkan pada pilihan spesifik yang lebih meresap dalam tindakan-tindakan, walaupun tidak secara langsung. Realisme dapat dianggap mengendalikan iklim politik sehingga suatu aksi apapun “tampak masuk akal” dan yang lain kelihatan naif karenanya. Ia telah menyediakan suatu petunjuk autentik bagaimana merasionalisasi “pilihan-pilihan sulit”, sehingga kebijakan politik yang demokratis apapun dianggap tak dapat dipahami, dengan begitu ia memberikan suatu dukungan semangat bagi para pengikutnya dalam mempertahankan interpretasinya terhadap kepentingan nasional apapun.¹⁸

Pemikiran-pemikiran kaum realis yang disebut juga dengan pandangan real politiknya mempengaruhi dua subjek, yang pertama, mempengaruhi cara pandang para pembuat keputusan dan para diplomat pasca perang, dalam konteks ini memunculkan kesadaran baru bagi para pembuat keputusan untuk mensadarkan pertimbangan-pertimbangan politiknya dengan mengedepankan elemen kepentingan nasional, peningkatan kekuatan, dan keseimbangan kekuasaan. Kedua, selaras dengan pergeseran pandangan tersebut, disiplin ilmu hubungan internasional menjadikan perspektif realisme sebagai titik pandang dan tolak ukur dalam melihat dan mengkaji fenomena hubungan internasional.

Amerika Serikat sebagai negara adikuasa yang tentunya mempunyai signifikansi atas tindakan negaranya dalam sistem internasional sangat terpengaruh oleh perspektif realis dengan real politiknya. Ditambah kemudian dengan adanya akar filsafat pragmatisme di Amerika Serikat, sehingga kajian HI dinilai harus lebih

¹⁸ Dikutip oleh Shaudi Hadi dari: William M.K. Trochim, *positivism & Post-Positivism, The research Methods Knowledge Base*, dalam: *Third Debat dan kritik positivisme ilmu hubungan internasional*, Yogyakarta dan Bandung, Jalasutra, 2008, hal. 62-63

pragmatis yang menyangkut pemuasan kebutuhan bagi para pembuat keputusan, yang dikenal dengan istilah “diskursus realisme pragmatis” yang diistilahkan oleh Shaummil Hadi.

Seiring hal tersebut Amerika Serikat membutuhkan pelegitimasi ilmu pengetahuan terhadap kepentingan tindakan politik luar negerinya. Kepentingan tersebut adalah perimbangan kekuasaan di Eropa dan didunia pasca perang sekaligus kebutuhan Amerika Serikat untuk menjadikannya negara super power melalui legitimasi ilmu lewat ilmu yang sah. Menurut Shaummil Hadi inilah mengapa ilmu HI seringkali disebut sebagai ilmu sosialnya Amerika Serikat, “*An American Social Science: Internasional Relations*”.¹⁹

Maka tindakan politik luar negeri Amerika Serikat sejak pengukuhan eksistensinya di kancah perpolitikan dunia tidak terlepas dari peran imigran intelektual pada era tahun 1920-1940an yang berhijrah ke Amerika Serikat. Tidak hanya pelegitimasi bagi tindakan politik AS tapi arti pentingnya bagi disiplin ilmu hubungan internasional pada fase selanjutnya. Kajian ilmu HI yang sebelumnya mempelajari riset-riset sejarah, hukum dan organisasi internasional beralih dan fokus kepada isu-isu general yang berkaitan dengan tindakan politik luar negeri negara-negara.

Dalam hal ini realisme bukan hanya dinilai sebagai alternative pandangan dan analisa pengetahuan terhadap kenyataan-kenyataan yang paling baik, namun aspek realistik dalam usaha tersebut. Dengan demikian, inilah alasan mengapa realisme juga

¹⁹ Shaummil Hadi, *opcit*, hal. 67

didesain sebagai kebutuhan politik luar negeri Amerika Serikat saat Perang Dunia Pertama dan pasca Perang itu.²⁰

Morgenthau adalah salah satunya, dalam membangun pandangan politik internasionalnya di AS. Begitu juga dengan perkembangan ilmu social Behavioralis yang mendapatkan iklim yang kondusif di ruang-ruang akademik di AS. Perkembangan ilmu HI didukung, didorong oleh para pembuat keputusan di AS dengan bantuan pendanaan terhadap riset-riset disiplin ilmu ini. Yang tidak lain hasil pengembangan riset tersebut dijadikan pembenaran atau legitimasi tindakan-tindakan politik luar negeri Amerika Serikat.

Sejak saat itu Amerika Serikat merupakan super power yang sangat kental warna kebijakan politik luar negerinya dengan apa yang disebut real politik-nya realisme. Dapat dilihat dari agresifitas tindakan luar negeri Amerika Serikat sebagai negara yang mempunyai keistimewaan, AS kuat dalam bidang politik, ekonomi dan militer, dan keistimewaan inilah yang mengukuhkan posisi Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dalam pencaturan politik dunia, dimulai dari perang Dunia Kedua dan pasca perang hingga isu-isu internasional temporer saat ini. Bagaimana Amerika Serikat mendominasi kawasan Timur Tengah, dengan menjadikan Arab Saudi sebagai sekutunya, dan dukungan penuh terhadap Israel baik dari segi ekonomi dan persenjataan. Memperkuat basis-basis militer di setiap kawasan, di Asia ada Jepang dan Korea Selatan terdapat pangkalan militer Amerika Serikat dan beberapa kawasan dunia lainnya. Militer merupakan kekuatan Amerika Serikat yang paling diandalkan dalam menyesuaikan kebijakan politik luar negeri AS dengan kepentingan

²⁰ *Ibid.*

nasional negara tersebut. Dengan militernya pula AS menancapkan eksistensinya di arus perpolitikan internasional sebagai negara super power yang mempengaruhi kedaulatan negara-negara yang dianggap sebagai musuh AS dan mengancam keamanan global. Citra sebagai polisi dunia kental diistilahkan kepada AS.

Maka tentunya sangat menarik ketika kita meneliti AS, terutama mengenai kebijakan politik luar negerinya yang agresif dan keterhubungannya dengan perkembangan mazhab realisme yang tumbuh dan berkembang di negara adikuasa tersebut, yang dimulai sejak Perang Dunia Kedua dan pasca perang. Terutama jika kita menilik kepada presiden AS yang cukup kontroversial, yaitu George Walker Bush dan segala kebijakan luar negeri pemerintahannya selama dua periode masa kepemimpinannya.

George W Bush dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-43 pada tanggal 20 Januari 2001. mulai saat itu, dan dalam perjalanan pemerintahannya, kebijakan politik luar negeri AS sangat kental dengan apa yang disebut sebagai realisme politik. Kebijakan luar negeri Bush sarat dengan nuansa arogansi, militeristik, penyeimbangan kekuatan dan konsep-konsep realisme lainnya. Perihal ini secara umum dapat kita lihat, pertama mulai dari kebijakan AS yang sangat kontroversial yang mendukung sepenuhnya eksistensi Israel dan segala tanduknya, dengan penyerangan yang dilakukan berkali-kali terhadap rakyat Palestina. Kedua, kebijakan strategi nuklir dan kontrol senjata, negara-negara yang mengembangkan teknologi nuklir dan dianggap sebagai ancaman internasional dapat ditindak dengan melakukan penyerangan militer atas negara tersebut, seperti kebijakan AS atas penolakan pengembangan teknologi nuklir Iran dan Korea Utara.

Ketiga, penyerangan militer Amerika Serikat ke Irak, dengan alasan membangun demokratisasi dan kepemilikan senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak, dan beberapa kebijakan luar negeri presiden Bush yang mengaplikasikan teori-teori realisme.²¹

Pada awal pemerintahannya, tahun 2001 G.W Bush melakukan peningkatan anggaran militer AS, 4,8 persen. Hal ini dapat ditilik dalam perspektif realis, dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan keamanan. Sejak peristiwa 9/11 (penyerangan WTC), pemerintahan Bush selalu mewacanakan ancaman keamanan global terutama keamanan domestik AS sebagai negara super power atas bahaya ancaman terorisme. Dan juga nampaknya sejak pasca-Peristiwa 11/9, iklim politik luar negeri Amerika Serikat bercorak real politik. Bush berhasil mengeluarkan doktrin pre-emptive "*new American way of war*" melalui kebijakan reformasi di bidang militer semisal munculnya konsep NCW (*network-centric warfare*).²²

Pada tahun 2004 George W. Bush kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat untuk yang kedua kalinya. Padahal rakyat Amerika Serikat tidak buta dan sadar akan kebijakan luar negeri Bush yang sangat bertolak belakang dengan konsep demokrasi dan HAM yang sangat dijunjung tinggi oleh rakyat Amerika Serikat, serta menjatuhkan citra AS di masyarakat internasional. Namun Bush dan para koleganya dengan cerdas mengkonstruksi pandangan rakyat Amerika Serikat akan ancaman dan bahaya terhadap keamanan nasional AS. Sehingga isu keamanan menjadi prioritas

²¹ Diakses dari: <http://maggiek.web.aplus.net/id136.html>

²² *Ibid.*

dan kepentingan nasional Amerika Serikat. Hal ini menjadi penjustifikasian atas tindakan real politik pemerintahan Bush.

Dalam kasus lainnya, AS dalam hal ini pemerintahan George W. Bush sangat mendukung tindakan Israel menginvasi rakyat Palestina, dengan menyokong Israel dalam ekonomi dan militer. Israel memiliki teknologi nuklir yang sudah jelas diarahkan pada pembuatan senjata nuklir. Terdapat setidaknya 200 hulu ledak nuklir yang dimiliki Israel menurut laporan tahun 1986. Perkembangan selanjutnya adalah peningkatan terus-menerus dalam hal ketahanan militer Israel hingga kekuatannya jauh melampaui negara-negara lain di kawasan timur tengah.²³ Dunia internasional sesungguhnya tidak menutup mata atas tindakan Israel yang brutal terhadap Palestina, ini dapat kita lihat, telah beberapa kali PBB memberikan resolusi atas Israel, namun usaha ini terlihat sia-sia ketika AS menggunakan hak vetonya atas keputusan yang dikeluarkan oleh PBB.

Sebenarnya tindakan AS yang demikiannya membela Israel dan sangat mensupport, baik ekonomi dan militer Israel, AS memiliki kepentingan yang kuat di kawasan Timur-Tengah (dunia Islam). Kondisi tersebut didukung dengan kekuatan ekonomi negara-negara Islam yang berbasis pada kepemilikan sumber-sumber minyak, suatu komoditas yang begitu penting bagi dunia, termasuk bagi Amerika sendiri. Hal ini menjadi capabilities tersendiri bagi kekuatan Islam yang dengannya bisa memegang ekonomi dunia secara keseluruhan. Dengan demikian kawasan Timur Tengah yang menjadi basis kekuatan Islam (yang juga dekat dengan Iran, Afghanistan, dan Pakistan) merupakan kawasan yang memerlukan penanganan lebih

²³ *Ibid.*

oleh Amerika. Namun demikian, Amerika tidak bisa dengan tiba-tiba menabuh genderang perang dengan negara-negara kawasan itu, karenanya perlu ada suatu kekuatan baru yang dilahirkan untuk menyeimbangkan kekuatan (menciptakan balance of power) di kawasan tersebut. Kekuatan tersebut adalah Israel, yang secara rutin tiap tahun memperoleh bantuan militer dari Amerika sebesar 2,4 milyar dolar Amerika.²⁴

Perkembangan terakhir mengenai kepemilikan teknologi nuklir Iran, setelah sebelumnya Pakistan, semakin mempersulit Amerika dalam menancapkan, serta memperdalam, hegemoninya, terutama atas negara-negara Islam. Bagi Amerika, memiliki teknologi nuklir berarti berpeluang untuk memproduksi senjata nuklir, dan itu berarti ada kekuatan baru yang mulai dapat menyaingi kekuatan militer Amerika. Karenanya lengkap sudah faktor pendukung kekuatan Islam, atau lebih tepatnya seperti apa yang dikemukakan Bernard Lewis, kebangkitan kembali Islam (*Islamic Revivalism*), yang mampu memberikan hambatan besar dalam penyebaran hegemoni Amerika.

Tak disangsikan lagi, Amerika Serikat memiliki kepentingan pribadi (*self-interest*) di Timur Tengah, baik yang berkaitan dengan *low politics* (dalam hal ini ekonomi) maupun keamanan (*high politics*). Kepentingan ekonomi di dalamnya meliputi kebutuhan akan minyak dan pemasaran persenjataan. Kepentingan keamanan diterjemahkan sebagai "*self-defense*" Amerika menghadapi kekuatan Islam. Di samping kepentingan minyak, Amerika juga berkepentingan dalam pemasaran peralatan militernya. Israel yang memiliki kekuatan militer canggih dan

²⁴ *Ibid.*

besar merupakan ancaman bagi negara-negara di Timur Tengah. Untuk itu, negara-negara tersebut harus, setidaknya, menyeimbangkan kekuatan mereka dengan melengkapi persenjataan militernya. di sini kepentingan Amerika dalam pemasaran peralatan militer akan terpenuhi.

Gambaran umum tindakan politik luar negeri AS pada masa pemerintahan George Wallker Bush yang penulis paparkan diatas mencerminkan asumsi-asumsi realisme, pertama, aktor penting dalam politik luar negeri adalah "entitas organisasi teretorial", kedua, dalam pandangan kaum realis, bahwa sifat kompetitif dalam pola interaksi politik internasional tidak dapat dihindari, persaingan itu terutama dalam peningkatan kekuatan militer untuk menjamin keamanan nasional suatu negara, walaupun muncul persaingan dibidang lainnya, seperti ekonomi, ketiga, adalah adanya salaing keterkaitan antar kekuatan negara dan kepentingan-kepentingan, maka negara mengejar kekuasaan dengan tujuan agar kepentinagannya tercapai, dan yang keempat adalah, bahwa perilaku negara-negara pada dasarnya merupakan hasil pembuatan keputusan rasional. Yang berarti negara-negara bertindak strategis dan instrumentalis dalam pencaturan politik internasional yang mengakibatkan meningkatnya "ketegangan".

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Easton, bahwa sistem politik disuatu negara harus mampu dan berinteraksi dengan lingkungan. Fungsi adaptif harus dimiliki oleh sebuah sistem politik dalam rangka stabilitas sistem itu. Berdasarkan pemikiran Easton diatas, demikian pula yang terjadi dalam sistem politik Amerika Serikat.

Ditambah dengan pemikiran G. Almond bahwa dalam sebuah sistem politik di suatu negara terdapat kelompok-kelompok yang selalu mendekati kekuasaan dalam rangka pencapaian kepentingan kelompok. Dan kelompok ini selalu berupaya agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menfleksibelkan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok. Dalam konteks ini. Politik luar negeri Amerika Serikat yang kental dengan warna real politik realisme. Tidak semata-mata merupakan karakter dari pembuat kebijakan, tetapi agregasi politiknya merupakan akomodasi yang adaptif terhadap kelompok-kelompok yang berada sangat dekat dalam lingkaran kekuasaan,

Dengan demikian, terdapat kelompok-kelompok kepentingan yang menganut nilai-nilai realisme yang selanjutnya dapat kita sebut sebagai kaum realis, dimana kepentingan mereka termanifestasikan dalam politik luar negeri Amerika Serikat.

Sehingga menarik untuk mengkaji mengenai aliran pemikiran realisme dan keterhubungannya dengan tindakan politik luar negeri Amerika Serikat yang memiliki signifikansi didalam sistem internasional. Dimana kajian HI berkembang dengan pesat dalam didalam iklim akademik Amerika Serikat, yang dimulai dari era Perang Dunia Kedua dan masa setelah perang. Terutama jika kita mengkaji perkembangan mazhab realisme yang berakar dalam iklim akademik dan keselarasannya dengan politik luar negeri AS, yang sebenarnya hanya merupakan alternatif-alternatif pandangan dan analisa pengetahuan terhadap kenyataan-kenyataan yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh para pembuat keputusan khususnya AS. Tuntutan akan diskursus pragmatisme dalam suatu tindakan negara merubah arus pemikiran dari idealis-liberal "utopian" ke perspektif realisme yang

dapat merefleksikan kenyataan apa adanya mengenai *subjek-matter* hubungan internasional

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut;

Bagaimana kaum realis mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat di era pemerintahan George Walker Bush?

C. Kerangka Dasar Teori

1. Pressure Group/Interest Group

Pressure group yang dikenal juga dengan sebutan kelompok kepentingan, yaitu individu-individu yang yang menggabungkan diri dan bergerak berdasarkan kepentingan dalam ranah sosial dan politik.²⁵ kepentingan merupakan basis aktivitas kelompok, kepentinganlah yang mengorganisasikan kelompok-kelompok, kelompok-kelompok dalam sistem sosial dan politik akan terus mengartikulasikan kepentingannya sampai kepentingan tersebut menemukan ekspresinya.

Adalah Gabriel A. Almond seorang ilmuan politik yang menilai bahwa kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat menduduki posisi penting dalam setiap sistem politik.²⁶ kemudian Gabriel membagi kelompok kepentingan menjadi empat (4), yaitu:

a. Kelompok Anomik

²⁵ S.P Varma, *Teori Politik Modern*, terj. Yohanes Kristiarto dkk, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 227

²⁶ Dr. Mochtar Mas'Oed & Dr. Collin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, cetakan VII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hal. 52

Kelompok ini terbentuk secara spontan dan hanya sementara, kelompok anomik ini tidak memiliki nilai yang pasti sehingga sering tumpang tindih (*overlap*) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional, seperti, demonstrasi, tindak kekerasan, kerusuhan politik. tetapi ketika pemimpin tidak cakap menanggapi perihal kelompok anomik ini, akan terjadi akumulasi kekecewaan dan pada kulminasinya memungkinkan memunculkan seorang pemimpin baru. Selanjutnya Almond berpendapat bahwa, kita harus jeli melihat aksi politik yang bersifat anomik ini, dimungkinkan bila aksi tersebut telah direncanakan dengan matang dan terorganisir oleh kelompok kepentingan yang terorganisir.

b. Kelompok Non-Assosiasional

Tidak berbeda jauh dengan kelompok anomik, kelompok ini jarang yang terorganisir dan bersifat kadang kala. Kelompok ini bersifat keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingan dengan tidak berpola atau kadang kala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga atau pemimpin agama/spiritual. Aspirasi kepentingan kelompok ini bersifat aksidental sesuai dengan kebutuhan sementara atas keadaan atau sistem, seperti kepentingan kelompok linguistik tertentu mengenai bahasa pengantar di sekolah, permintaan dari beberapa tuan tanah kepada birokrat dalam suatu klub sosial informal terhadap tarif hasil pertanian dan sebagainya.

c. Kelompok Institusional

Kelompok kepentingan ini sering kali didukung oleh birokrasi atau unit-unit sistem dalam suatu negara karena bersifat formal, kelompok institusional ini

biasa berbentuk badan hukum maupun kelompok-kelompok lebih kecil dalam badan hukum tersebut, seperti fraksi-fraksi dalam lembaga legislatif, klik-klik perwira, departemen, dan klik-klik ideologis dalam sistem atau birokrasi. Dalam artikulasi kepentingannya kelompok ini biasa membawa kepentingannya sendiri atau kepentingan dari kelompok-kelompok lain dari masyarakat.

Almond menilai kelompok ini kuat dikarenakan basis organisasinya yang kuat dan merupakan sub-sub dari sistem dalam birokrasi.

d. Kelompok Assosiasional

Kelompok assosiasional ini merupakan kelompok kepentingan yang khas yang menyatakan kepentingannya dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staff professional yang bekerja penuh, serta memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Seperti serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan pengusaha dan industrialis.

Gabriel A. Almond mencontohkan, di Inggris, federasi besi dan baja, yang beranggotakan direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan besar, dalam ruang elit public melakukan perundingan-perundingan dengan pemerintah mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi industri secara keseluruhan. Dalam menyatakan hubungannya federasi ini melakukan tawar-menawar dalam ruang-ruang elit publik dengan pejabat-pejabat pemerintah tentang peraturan pemerintah bahkan membuat usul rencana undang-undang di parlemen demi keuntungan dan stabilitas dunia industri.

Strategi dan taktik kelompok asosiasi dalam mencapai tujuannya sering diakui sah dalam masyarakat, dan keberadaan kelompok ini jelas Almond membatasi pengaruh kelompok kepentingan non-Assosiasional.

Agar dalam mencapai kepentingannya atau tercapai tujuannya, kelompok kepentingan harus mampu mencapai dan berhubungan langsung dengan pembuat keputusan politik, kelompok kepentingan harus mampu menyusupi struktur keputusan politik dan mempengaruhi output kebijakan politik.

2. Teori Elite

Dalam sebuah pemerintahan Negara, terutama dalam system demokrasi akan terdapat sejumlah golongan kecil (elite) yang lebih secara kualitas, memiliki superioritas atas masyarakat mayoritas. Sistem demokrasi akan selalu memproduksi dan bahkan mereproduksi golongan elite.

Yang berarti bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh.²⁷ Individu atau kelompok yang terbaiklah yang mampu menjangkau pusat kekuasaan, mereka inilah yang dikenal sebagai elite. Para elite ini memiliki kualitas-kualitas diatas atau bahkan yang tidak dimiliki oleh mayoritas masyarakat, sehingga dengan kelebihan ini mereka para elite memiliki superioritas atas golongan rendah atau non-elite, yang walaupun unggul dari segi kuantitas.

Lebih lanjut menurut salah seorang tokoh pencetus teori elite, Vilfredo Pareto, masyarakat terbagi menjadi dua kelas, pertama; lapisan atas yaitu elite, yang terbagi kedalam elite yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah

²⁷ S.P Varma, *Opcit.* hal. 200

(*non-governing elite*), dan lapisan kedua adalah; lapisan yang lebih rendah, golongan non-elite.²⁸ Pareto sendiri cenderung lebih memfokuskan pengamatan terhadap elite yang memerintah, yang menurutnya elite tersebut mampu memadukan antara kekuasaan dan kelicikan. Dan nampaknya dalam kasus ini sesuai dengan pandangan Nicollo Machiavelli tentang penguasa yang harus dapat bertindak layaknya singa dan rubah.

Elite yang memerintah pun terbagi atas dua tipe, Pareto berpandangan bahwa, ada elite yang memerintah dengan kelicikan dan yang memerintah dengan cara paksa.²⁹

Dalam rangka pembenaran terhadap tindakan atau kebijakan-kebijakannya elit yang memerintah melakukan penyerapan (*derivation*) atau menggunakan mitos-mitos yang mereka ciptakan untuk mengelabui massa untuk memperalatnya atau legitimasi tindakan melalui konstruksi rasionalitas terhadap masyarakat atau yang dalam istilah Pareto adalah lapisan rendah atau massa.

Senada dengan pandangan Vilfredo Pareto, adalah Gaetano Mosca (1858-1941) seorang ilmuwan politik yang menolak klasifikasi bentuk pemerintahan, seperti, Monarki, Aristokrasi dan demokrasi yang telah dipakai sejak zaman Yunani kuno, dia menegaskan bahwa hanya ada satu bentuk pemerintahan, yaitu Oligarki.³⁰

Mosca menilai bahwa dalam setiap bentuk pemerintahan dalam suatu negara, selalu dan pasti akan muncul dua kelas dalam masyarakat, yaitu kelas yang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hal. 202

³⁰ *Ibid.*

memerintah dan diperintah. Kelas yang memerintah yang jumlahnya sedikit memegang seluruh fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan dari kekuasaan.

Kemudian Mosca percaya akan selalu terdapat elite dalam sebuah sistem pemerintahan, suksesi atau pergantian pemimpin tidak akan dapat menghentikan adanya segelintir orang untuk menguasai seluruh fungsi-fungsi sosial dan politik yang ada, menurut Mosca hanyalah pergantian para elite.³¹

3. Analisa Sistem Politik (David Easton)

Konsep Easton tentang lingkungan politik adalah "suatu sistem perilaku yang terbaaur dalam suatu lingkungan pada pengaruh-pengaruh yang diungkap oleh sistem politik itu sendiri dan pada gilirannya bereaksi."³² Hal ini berarti bahwa diluar sistem politik terdapat sistem-sistem lain atau lingkungan, baik itu fisik, biologi, sosial, psikologi, dan sebagainya.

Selanjutnya Easton menjelaskan sistem politik sebagai sistem interaksi dalam tiap masyarakat dimana didalam alokasinya yang mengikat atau yang mengandung otoritas dibuat dan diimplementasikan. Yang berarti bahwa pembuatan alokasi yang terlindungi dan mengandung otoritaslah yang membedakan sistem politik dari sistem lain, baik yang didalam maupun yang diluar semua masyarakat yang membentuk lingkungan bagi sistem politik.

³¹ *Ibid.* hal. 203

³² S.P Varma, *Op.cit.* hal. 275

Pandangan Easton tentang sistem politik merupakan sistem yang terbuka dan adaptif yang memusatkan perhatiannya kepada studi tentang sifat-sifat perubahan dan transaksi-transaksi yang terjadi diantara suatu sistem politik dan lingkungan.³³

Dengan demikian maka suatu sistem politik harus mempunyai kemampuan untuk merespon gangguan-gangguan, hal ini bertujuan agar sistem mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi yang mengharuskannya berfungsi, atau dan bertindak. Dalam kondisi ini adaptif diartikan berbeda dari hanya sekedar bereaksi secara pasif terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan.

Yang artinya bahwa, sistem politik mengakumulasi sejumlah besar unsur mekanisme yang mereka gunakan untuk bekerja sama dengan lingkungan mereka dan untuk mengatur perilakunya sendiri, mengubah struktur internalnya, dan bahkan membentuk kembali tujuan-tujuan fundamentalnya. Dan berarti Easton sangat percaya bahwa di dalam intern organisasi sistem politik, sistem tersebut mempunyai kapasitas yang luar biasa untuk menyesuaikan diri pada keadaan-keadaan dimana dia harus berfungsi.³⁴

Kemudian ketika kita melihat sistem politik di Amerika Serikat terutama politik luar negeri negara tersebut, dengan berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, bahwa ada kelompok-kelompok kepentingan yang selalu berkompetisi bergerak ke arah sumber kekuasaan. Menurut pandangan Vilfredo Pareto, dalam sebuah sistem apaun terutama demokrasi akan selalu terdapat golongan kecil yang superior atas

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid.* hal. 276

kebanyakan masyarakat yang dikenal sebagai kaum elite, dan elite terbagi menjadi dua, yaitu elite yang memerintah dan elite yang tidak memerintah. Elite yang tidak memegang kekuasaan eksekutif inilah yang diistilahkan oleh Gabriel Almond sebagai kelompok-kelompok kepentingan.

Selanjutnya berdasarkan teori sistem David Easton sebuah sistem politik yang kuat harus menjaga dukungan dari "para sistem" dan lingkungan minimal dalam batas minimum dukungan. Ketika sebuah sistem tidak mampu mengadaptasikan dan reaktif terhadap tuntutan-tuntutan, maka mereka akan menarik dukungan tersebut yang mengakibatkan sistem akan rapuh dan sirna.

Berdasarkan fakta atas tindakan luar negeri AS yang menekankan kekuatan militer dapat kita analisa bahwa terdapat kelompok elite yang berada diluar struktur kekuasaan, tetapi mempunyai peran dan pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri AS yang bercorak realisme. Dan kelompok-kelompok ini dapat kita identifikasikan sebagai kaum realis yang nilai-nilai kelompok tersebut termanifestasikan dalam politik luar negeri Amerika Serikat.

C. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka dasar teori maka dapat diambil kesimpulan sementara, bahwa kaum realis mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat dengan cara:

- a. Mempengaruhi pembentukan opini publik, untuk mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan G.W. Bush

- b. Mempengaruhi kebijakan politik luar negeri AS melalui lembaga-lembaga “think-tank” birokrasi Amerika Serikat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperdalam wacana penulis dan mahasiswa Hubungan Internasional pada umumnya tentang aliran pemikiran realisme, bagaimana alur perkembangan paradigma tersebut dalam studi hubungan internasional terutama di Amerika Serikat. Serta pengaruhnya dalam tindakan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, khususnya AS dibawah kepemimpinan George Wallker Bush.

E. Jangkauan Penelitian

Sangat diperlukan sekiranya pembatasan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini, perihal ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan pembahasan dan kefokuskan dalam penulisan serta merupakan pembuktian atas pokok bahasan dan hipotesa yang telah disusun., kemunculan mazhab realisme, serta keterkaitan mazhab realisme dengan tindakan politik luar negeri Amerika Serikat dibawah kepemimpinan George Wallker Bush.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui buku-buku literatur, kliping, artikel, makalah-makalah, internet, surat kabar, majalah, dan dokumentasi lain yang terkait, yang disebut sebagai teknik library research.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan salah satu unsur yang mendukung penulisan sebuah karya ilmiah, maka sudah pasti penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan.

Maka dengan demikian penulisan skripsi ini diharapkan sesuai dengan kaidah penulisan yang telah dibakukan dalam beberapa penulisan karya ilmiah.

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dipaparkan pendahuluan skripsi, seperti, pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Politik Luar Negeri George Wallker Bush.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tindakan politik luar negeri Amerika Serikat pada saat pemerintahan George Wallker Bush. Dimana tindakan politik luar negeri AS militeristik, mengejar kekuasaan yang merefleksikan nilai-nilai realisme

BAB III. Realisme Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Era kepemimpinan George W. Bush.

Dalam bab ini akan dipaparkan pemikiran realisme, perkembangan realisme di Amerika Serikat sebagai paradigma dominant Ilmu Hubungan Internasional, dan konsep-konsep realisme yang termanifestasikan dalam tindakan politik luar negeri AS dibawah pemerintahan George Wallker Bush.

BAB IV. Peran Kaum Realis dalam pemerintahan George W Bush.

Dalam bab ini penulis memaparkan bagaimana kelompok-kelompok kepentingan memiliki signifikansi atas iklim politik di Amerika Serikat terutama dalam tindakan politik luar negeri Amerika Serikat.

BAB V. Kesimpulan.

Bab ini berisikan penutup dan kesimpulan penulis dari apa yang telah penulis paparkan diatas.